

## **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR**

**(Studi Kasus pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)**

Arta Kusumaningrum

Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta  
arta.kusumaningrum@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Community development is a strategy to improve potencies of community and to be empowered. Poverty reduction should be done through community development program. Practices of community development is not only involve government, and pertinent institution as subject in poverty reduction but also involving society. Study case on coastal community in Purworejo Regency, with regard to community development policy has been directed to solve poverty in coastal community by analysing the cause of poverty, identify problem, and problem solving. Policy that can be taken is the idea to direct in creating program so that will be effective in poverty reduction for coastal community in Purworejo Regency. By involvement of many parties such as government, pertinent institutions, and society, the sustainability of poverty reduction program with community development as basic strategy can be sustain.*

*Keywords: Community development, Coastal community, Poverty reduction, and Purworejo Regency,*

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan masalah yang sampai saat ini menjadi beban dan tugas pemerintah beserta stakeholder terkait, karena menyangkut harkat hidup orang banyak. Tidak mudah memang untuk mengatasi kemiskinan benar-benar hilang dari kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan aspek kemiskinan sangat luas dan kompleks yang dipengaruhi banyak faktor didalamnya. Menurut Goudzwaard dan Lange (1998), kemiskinan diartikan sebagai hidup pada atau di bawah garis kemiskinan, yang biasanya didefinisikan dengan kriteria WHO: ketika seseorang terlalu miskin untuk mendapatkan "makanan cukup kalori". Namun faktanya kemiskinan yang terjadi bisa lebih parah dari kekurangan makanan yang cukup akan kalori.

Menurut Susilowati (2010), berdasarkan definisinya kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat. Kemiskinan relatif merupakan suatu kondisi di mana individu atau kelompok orang berada dalam tingkatan kekurangan dibandingkan dengan standar kehidupan umum (disebut sebagai garis kemiskinan) yang layak berlaku di masyarakat. Mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Kemudian yang kedua adalah kemiskinan absolut, di mana kemiskinan absolut ini berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok minimum. Seseorang disebut miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidup minimum (*basic need*) seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (Sumodiningrat, 1988 *cit* Susilowati, 2010).

Selain itu juga kemiskinan dapat dilihat dari penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya kemiskinan dibedakan menjadi tiga yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural ataupun kemiskinan kultural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan karena sumber daya yang tidak memadai baik secara SDA ataupun SDM. Akibatnya dengan kemampuan SDM yang rendah, masyarakat tidak dapat mengeksplorasi SDA untuk mencukupi kebutuhan hidup. Lagi pula ketersediaan SDA juga tidak mendukung untuk dapat dikembangkan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan. Kemiskinan struktural disebabkan karena pengaturan kelembagaan atau status sosial dalam masyarakat yang membuat seseorang terbelenggu dan tidak memiliki kesempatan karena lemahnya akses pada kekuasaan. Penyebab kemiskinan terakhir yaitu disebabkan budaya, yang disebut dengan kemiskinan kultural. Kemiskinan ini terjadi karena gaya hidup, kebiasaan, dan budaya masyarakat setempat. Pengeluaran yang berlebihan untuk upacara adat mencapai titik yang tidak rasional, sebaiknya diinvestasikan dan ditabung sebagai modal usaha atau simpanan untuk keperluan yang akan datang.

Berdasarkan BPS (2012), secara nasional jumlah dan presentase penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun selama periode 2006-2012. Berikut ini merupakan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia menurut kategori desa dan kota tahun 2006-2012.

**Tabel 1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut**  
**Kategori Desa dan Kota Tahun 2006- 2012**

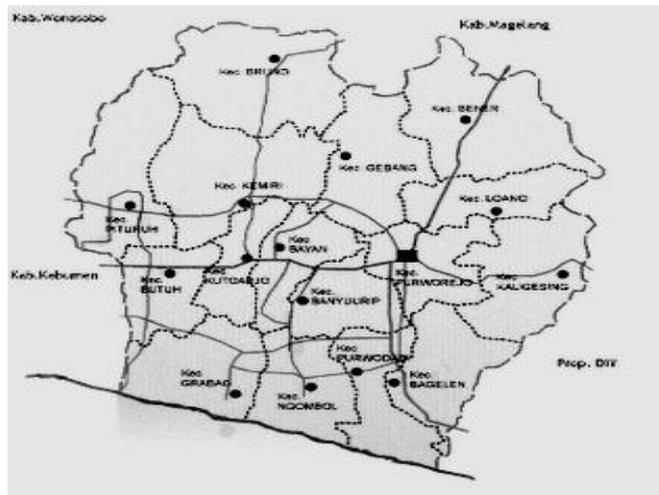
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49
(Mar)						
2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36
(Sep)						
2012	10,65	18,48	29,13	8,78	15,12	11,96
(Mar)						

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (*Susenas*) BPS, 2012

Menurut data BPS (2012), informasi yang diterima setiap tahun jumlah dan persentase penduduk miskin berdasar kategori desa dan kota terus berkurang, namun masih banyak yang mempertanyakan kebenaran akan data tersebut karena pada kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan kasus kemiskinan di desa dan kota. Data BPS (2012), menunjukkan jumlah penduduk miskin di desa lebih banyak dibandingkan di kota. Hal ini dapat terjadi dengan berbagai kemungkinan seperti kurangnya akses yang diakibatkan dari topografi wilayah,

transportasi, infrastruktur, kurang terbukanya informasi dan teknologi untuk melakukan pergerakan mengubah nasib mencari kehidupan yang lebih sejahtera.

Studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Purworejo penulis memberikan konsentrasi pada masyarakat pesisir yang notabene sangat berbeda dengan masyarakat desa dan kota seperti yang digambarkan oleh BPS 2012 Nasional. Hal ini dengan pertimbangan Kabupaten Purworejo memiliki tempat strategis yang berhubungan langsung dengan laut di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Purwodadi. Ketiga kecamatan ini memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar apabila dapat dikembangkan secara optimal. Namun apa daya masyarakat pesisir seringkali disebut sebagai masyarakat yang termarginalkan. Karena termarginal maka penghidupan masyarakat pesisir perlu mendapat perhatian layaknya kemiskinan yang terjadi di desa dan kota. Masyarakat pesisir memiliki kegiatan sosial ekonomi menarik yang berbeda dari masyarakat desa dan kota. Setiap harinya masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya mencari sumber daya laut berupa beraneka jenis ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, kerang, rumput laut, terumbu karang, mutiara, kura-kura, air garam dll. Sumber daya laut yang melimpah membuat nelayan enggan untuk berpindah ke kota. Mereka lebih suka tinggal bersama keluarga dan mencari penghasilan di tempat mereka tinggal. Namun ternyata jauh dari benak kita masih banyak masyarakat pesisir yang tergolong miskin.



Sumber: Data Primer Diolah, 2010

**Gambar 1**  
**Peta Kabupaten Purworejo**

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan pada tahun 2010-2011. Hasil Susenas 2010 menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin berjumlah 115.300 jiwa sementara tahun 2011 naik menjadi 121.941 jiwa ([www.radarjogja.co.id](http://www.radarjogja.co.id)). Sedangkan total keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo pada tahun 2010 sebesar 695.427 jiwa kemudian meningkat pada tahun 2011 sebesar 696.141 jiwa ([www.regionalinvestment.bkpm.go.id](http://www.regionalinvestment.bkpm.go.id)). Jumlah penduduk total tahun 2010 di

Kabupaten Purworejo sebanyak 695.427 jiwa, termasuk di dalamnya sebanyak 121.941 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Purworejo. Hal ini berarti terdapat sekitar 16,58% penduduk miskin dari jumlah total penduduk yang ada di Kabupaten Purworejo. Apabila dibandingkan tahun 2011 ada sejumlah 696.141 jiwa total penduduk di Kabupaten Purworejo diantaranya sebesar 121.941 jiwa merupakan penduduk miskin. Hal ini menunjukkan ada sekitar 17,52% penduduk miskin pada tahun 2011 di Kabupaten Purworejo. Nampak sekali peningkatan persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2010-2011 di Kabupaten Purworejo yaitu sebesar 16,58% menjadi 17,52%.

Mendasarkan pada data kemiskinan Kabupaten Purworejo, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya terutama tahun 2013 dan seterusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dapat menekan angka kemiskinan agar tidak terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Fokus pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan di daerah pesisir pantai Kabupaten Purworejo. Pemilihan daerah pesisir sebagai obyek dari pengentasan kemiskinan adalah karakteristik lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya yang unik dengan sumber daya alam yang melimpah namun masih banyak masyarakat pesisir yang hidup serba kekurangan. Padahal begitu banyak potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan. Hal ini yang perlu ditelusuri penyebab kemiskinan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Purworejo. Penyebab kemiskinan yang terjadi akan dilihat berdasarkan kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Oleh karena itu dengan mengetahui ketiga penyebab kemiskinan tersebut membantu pembuat kebijakan dalam memetakan rumusan solusi dalam penyelesaian pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kehidupan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Purworejo**

Menurut Utami (2010), masyarakat pesisir sering diidentikkan dengan masyarakat miskin. Disebut miskin karena masih banyak masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari sumber daya laut namun modal usaha yang dimiliki relatif kecil, peralatan tangkap tradisional, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Hal tersebut yang mengakibatkan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Purworejo hanya mendapatkan hasil ikan yang sangat minim. Belum lagi pekerjaan mereka sangat tergantung dengan alam. Tidak sewaktu-waktu nelayan dapat mencari ikan di laut dengan seandainya namun mereka mengacu pada musim dan iklim. Pada saat musim barat nelayan dapat mencari ikan di laut karena cuaca yang mendukung namun pada saat musim timur (paceklik) nelayan tidak bisa menggantungkan hidupnya dari hasil melaut. Ketidakpastian musim dan iklim ini yang menjadi kendala masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dengan mata pencaharian sebagai nelayan.

Lain halnya dengan Kusnadi (2003), yang melihat kehidupan masyarakat pesisir dari struktur sosial budaya yang tercermin dalam operasional memiliki kontribusi besar dalam membentuk corak pelapisan sosial ekonomi secara umum dalam kehidupan masyarakat nelayan. Mereka yang menempati lapisan sosial atas adalah para pemilik perahu dan pedagang ikan yang sukses; lapisan tengah ditempati oleh juragan laut atau pemimpin awak perahu; lapisan terbawah ditempati oleh nelayan buruh. Mereka yang menempati lapisan atas hanya sebagian kecil dari masyarakat nelayan, sedangkan sebagian besar warga masyarakat nelayan berada pada lapisan terbawah. Pelapisan sosial ekonomi ini

mencerminkan bahwa penguasaan alat-alat produksi perikanan, akses modal, dan akses pasar hanya menjadi sebagian kecil masyarakat yaitu mereka yang berada pada lapisan atas.

Oleh karena itu perbedaan lapisan struktur sosial berdampak pada pembagian hasil yang terjadi dikalangan nelayan. Menurut Kusnadi (2003), sistem pembagian hasil atau pemasaran hasil tangkapan, yang menempatkan para pemilik perahu atau pedagang perantara/pedagang ikan memperoleh bagian atau keuntungan besar dari kegiatan tersebut, dianggap sebagai kewajiban. Pembagian tersebut dianggap sesuai dengan kontribusi, biaya, resiko ekonomi yang harus ditanggung dalam proses produksi dan pemasaran hasil tangkapan. Persepsi demikian terbentuk karena faktor keterpaksaan atau karena tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan nelayan. Struktur sosial budaya yang demikian yang mengakibatkan nelayan miskin. Penyebab kemiskinan tersebut dikenal sebagai kemiskinan struktural.

Seperti yang telah digambarkan kehidupan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo, tidak hanya kemiskinan yang dialami karena dampak struktural dan natural namun juga kultur masyarakat pesisir menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo masih sangat kental dengan kepercayaan kepada alam dan lingkungannya. Mereka melakukan upacara laut sebagai wujud doa kepada Sang Pencipta agar selalu dilindungi dan diberi keselamatan dalam melakukan pekerjaannya sebagai nelayan. Selain itu doa ini juga merupakan salah satu ungkapan syukur yang telah diberikan rejeki melalui perantara laut sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pengeluaran untuk penyelenggaraan upacara kadang tidak terhitung jumlahnya sehingga mengakibatkan pendapatan yang diterima tidak seimbang dengan pengeluaran dan sering terjadi kasus hutang bahkan penjualan aset produksi. Kemiskinan kultural dapat disebabkan karena gaya hidup budaya setempat yang tidak rasional. Gaya hidup yang dimaksud terkait dengan pandangan masyarakat akan kedudukan kita sebagai warga (status sosial). Sesuai dengan teori motivasi maslow bahwa selain dorongan untuk pemenuhan kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial dan kasih sayang, juga terkait dengan harga diri dan aktualisasi diri. Ketika masyarakat pesisir dapat merayakan upacara adat secara mewah maka mereka akan dipandang dan memiliki status di lingkungan tempat tinggal mereka, hal ini terkait dengan *self esteem*/harga diri. Analisa identifikasi permasalahan ini perlu melihat secara holistik yang melibatkan beberapa aspek secara terintegrasi seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, birokrasi dll yang nantinya menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan agar ketepatan dalam mengatasi kemiskinan dapat dicapai dengan mengurangi angka kemiskinan khususnya untuk masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo.

### **Pendekatan-Pendekatan untuk Mengetahui Kemiskinan**

Mengetahui sasaran kemiskinan, kita perlu melakukan pendekatan dalam rangka mengetahui jumlah dan persentase kemiskinan. Dari hasil ini nanti yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan aplikasi bantuan langsung yang tepat sasaran kepada masyarakat terutama untuk masyarakat pesisir. Untuk mengetahui kategori kemiskinan ada dua pendekatan yang dapat dilakukan yaitu pendekatan dengan konsep kebutuhan dasar dan pendekatan dengan garis kemiskinan.

a. Konsep kebutuhan dasar (*Basic Needs*)

Menurut Susilowati (2010), konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau dasa minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi dua golongan besar yaitu kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya dan kedua, kebutuhan lain-lain yang bersifat lebih tinggi.

Menurut Sumardi dan Evers (1982), model kebutuhan dasar sebagai suatu strategi memenuhi lima sasaran pokok yaitu:

1. Dipenuhinya kebutuhan pangan, sandang, pangan dan perumahan, peralatan sederhana dan berbagai kebutuhan yang dipandang perlu.
2. Dibukanya kesempatan luas untuk memperoleh berbagai jasa, pendidikan untuk anak dan orang tua, program preventif dan kuratif kesehatan air minum, pemukiman dengan lingkungan yang mempunyai infrastruktur dan komunikasi, baik rural maupun urban.
3. Dijamin hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif (termasuk menciptakan sendiri) yang memungkinkan adanya balas jasa setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa, ataupun dari perdagangan internasional untuk memperolehnya dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan bagi pembiayaan usaha selanjutnya.
5. Menjamin adanya partisipasi masa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek.

Pendekatan untuk mengetahui kemiskinan suatu daerah memang tidaklah mudah. Banyak indikator yang perlu kita lihat secara teliti dan jeli untuk menggambarkan keadaan populasi daerah miskin yang sesungguhnya dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan. Setiap regional sebaiknya membuat kriteria kemiskinan dengan dalih mereka yang paling mengetahui keadaan sesungguhnya di lapangan, sehingga pendekatan-pendekatan kemiskinan yang sudah ada dapat digunakan sebagai acuan ataupun referensi dalam pembuatan kriteria miskin di daerah setempat. Beberapa sumber lain membagi kebutuhan dasar dengan ragam yang berbeda seperti yang ditampilkan pada Tabel 2 berikut:

b. Kriteria Garis Kemiskinan

Menurut Susilowati (2010), perkiraan garis kemiskinan merupakan refleksi dari suatu konsep kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan dasar dalam mengukur tingkat kemiskinan. Garis kemiskinan resmi yang digunakan di Indonesia adalah garis kemiskinan yang disusun oleh BPS. Secara teknis garis kemiskinan yang disusun oleh BPS dibangun dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan dihitung dari besarnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan minimum energi (kalori) per kapita/hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan dihitung dari besarnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Namun beberapa ahli menetapkan bahwa kriteria garis kemiskinan yang berbeda-beda, yaitu berdasarkan konsumsi beras atau ekuivalen beras,

kebutuhan gizi minimum, pengeluaran belanja non pangan, atau pendapatan per kapita. Uraian di atas dirangkum pada Tabel 3 terkait kriteria garis kemiskinan.

**Tabel 2**  
**Tabel Ragam Kebutuhan Dasar**

Sumber	Kriteria atau Golongan Kebutuhan
United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD), (1966)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan fisik primer: kebutuhan gizi, perumahan, kesehatan.</li> <li>• Kebutuhan kultural: pendidikan, rekreasi, ketenangan hidup.</li> <li>• Kebutuhan lainnya yang lebih tinggi jika kebutuhan primer dan kultural sudah terpenuhi.</li> </ul>
United Nation (1961)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan dasar meliputi: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial dan kebebasan manusia.</li> </ul>
Green (1978)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal consumption items: pangan, sandang dan pemukiman.</li> <li>• Basic public services: fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan dan kebudayaan.</li> </ul>
Esmara (1986)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan dasar primer: pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.</li> </ul>
BPS (2005)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makanan dan non makanan</li> </ul>

Sumber: Susilowati, 2010

Tabel 3, menjelaskan secara gamblang bahwa kriteria garis kemiskinan menurut para ahli dibedakan berdasarkan letak di mana daerah berada yaitu desa atau kota. Hal ini karena kedua tempat tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan ini yang nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kriteria kemiskinan pada masing-masing daerah tersebut. Perbedaan yang sangat mencolok antara desa dan kota tidak bisa memiliki indikator dan ukuran yang sama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemaksaan dalam persamaan untuk kepentingan pengentasan program kemiskinan akan berdampak pada ketidaktepatan sasaran serta menjadikan hal tersebut menjadi ambigu. Oleh karena itu, pemangku kebijakan perlu mengetahui karakteristik desa dan kota guna mencari sasaran agar program kemiskinan yang dilakukan tepat pada orang yang membutuhkan pemberdayaan.

Kritik untuk kriteria garis kemiskinan di atas belum menjelaskan secara jelas wilayah pesisir masuk dalam kategori karakteristik desa ataupun kota, karena wilayah pesisir mempunyai ciri khas unik tersendiri. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo bersifat general tidak dipisahkan berdasar garis kemiskinan. Pertimbangan yang mendasari pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir biasanya daerah pesisir merupakan daerah yang termarginalkan dan kurang adanya perhatian untuk mengembangkan potensi alam yang sudah ada. Kebanyakan dari

masyarakat hanya memanfaatkan potensi alam sebagai nelayan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari belum sampai tahap berorientasi *profit* ataupun bisnis. Hal ini yang perlu dipertimbangkan bagi perancang kebijakan dalam rangka menyusun program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat pesisir.

**Tabel 3**  
**Beberapa Kriteria Garis Kemiskinan**

Penelitian	Kriteria Garis Kemiskinan	Kota (K)	Desa (D)	K+D
Esmara, 1986	Konsumsi beras/kapita/tahun (kg)			125
Sayogyo, 1971	Tingkat pengeluaran ekuivalen beras/orang/tahun (kg)			
	• Miskin	480	320	
	• Miskin sekali	360	240	
	• Paling miskin	270	180	
Ginneken, 1969	Kebutuhan gizi min/orang/hari			
	• Kalori			2000
	• Protein (gram)			50
Anne Booth, 1969	Kebutuhan gizi min/orang/hari			
	• Kalori			2000
	• Protein			40
BPS, 2000	• Konsumsi kalori/kapita/hari			2100
	• Pengeluaran non makanan			
Garis kemiskinan internasional	Tingkat pendapatan/kapita/hari (US\$)			1 atau 2

Sumber: Susilowati, 2010

### Identifikasi Masalah di Kabupaten Purworejo

Identifikasi masalah bertujuan untuk membantu pembuat kebijakan dalam memetakan permasalahan yang ada di lapangan. Identifikasi ini melibatkan orang dalam dan luar dengan cara observasi dan interview langsung dengan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo. Melibatkan orang dalam dan orang luar dengan pertimbangan agar data dan informasi yang diperoleh saling melengkapi satu sama lain sehingga data dan informasi yang didapatkan benar-benar lengkap. Selain itu juga penggunaan orang luar dimaksudkan agar data dan informasi yang diperoleh sifatnya objektif tidak memihak pihak tertentu. Dalam kasus pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo digunakan alat analisis SWOT untuk memudahkan dalam pemetaan masalah.

Identifikasi masalah pada Tabel 4. maka telah jelas mana yang merupakan kelebihan dari masyarakat pesisir dan mana yang menjadi kelemahan bagi masyarakat pesisir. Tabel 4 memberikan informasi kepada kita bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki aset yang luar biasa banyak. Sumber kekayaan laut yang melimpah mulai dari beragam jenis ikan di laut, kerang, cumi-cumi, udang, rumput laut dan garam bisa didapatkan setiap hari. Kita juga mengetahui bahwa makanan laut memiliki jumlah gizi yang banyak sehingga sering diburu oleh orang lokal bahkan internasional sekalipun. Apalagi bagi orang-orang yang memiliki kegilaan tersendiri dengan makanan jenis *sea food*. Selain itu dari sumber daya alam yang melimpah ruah masyarakat pesisir dapat memodifikasi

hasil laut menjadi produk olahan. Makanan olahan ini akan lebih awet sehingga tahan disimpan sehari-hari, berbeda dengan ikan yang langsung di jual ke pasar. Produk olahan hasil laut memiliki *value added* yang dapat menciptakan harga lebih tinggi dibanding hasil laut mentahan. Oleh karena itu usaha yang dapat dilakukan seperti membuka tempat makan aneka *sea food*, kerajinan tangan hasil laut, produk makanan ringan ataupun membuat garam. Ini akan menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat pesisir.

**Tabel 4**  
**Identifikasi Masalah Masyarakat Pesisir di Purworejo**

Indikator	Analisis SWOT
<i>Strenght</i> (S)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat pesisir memiliki sumber daya laut yang melimpah misalnya: berbagai macam ikan, kerang, cumi-cumi, udang, rumput laut dan garam.</li> <li>Berbatasan dengan darat sehingga bisa mendapatkan alternatif pekerjaan yang lainnya.</li> <li>Transportasi mendukung dekat dengan jalur darat.</li> </ul>
<i>Weakness</i> (W)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya mengandalkan dari sumber laut saja.</li> <li>Kurangnya fasilitas untuk menangkap ikan, masih menggunakan kapal tradisional (perlu motorisasi).</li> <li>Harga bensin mahal.</li> <li>Upacara adat yang menelan biaya tinggi.</li> <li>Masih adanya struktur sosial ekonomi di masyarakat yang merugikan nelayan kecil.</li> <li>Sumber daya manusia kurang berdaya.</li> </ul>
<i>Opportunities</i> (O)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah pesisir merupakan salah satu obyek alam yang indah yang dapat digunakan sebagai sumber masukan daerah dengan membuka obyek wisata.</li> <li>Membuka tempat makan <i>sea food</i> sebagai usaha yang dapat dikelola per rumah tangga.</li> <li>Pembuatan kerajinan dengan menggunakan kerang dan pasir sebagai hasta karya olahan <i>handmade</i> khas daerah tersebut.</li> <li>Membuat makanan ringan dari hasil laut, misalnya: ikan kering, sambal ikan kering dll,</li> <li>Penghasil garam.</li> </ul>
<i>Treat</i> (T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikan semakin langka sehingga perlu jauh berlayar untuk mendapatkan ikan.</li> <li>Terjadi kerusakan alam.</li> <li>Cuaca dan iklim yang tidak menentu sehingga mengakibatkan nelayan tidak bisa selalu mengandalkan laut sebagai sumber mata pencaharian.</li> </ul>

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Namun perlu kita sadari beberapa kelemahan potensi alam laut ini yaitu nelayan tidak sewaktu-waktu dapat berlayar untuk mencari ikan karena tergantung dengan kondisi cuaca dan iklim. Tidak sembarang musim nelayan dapat berlayar di laut, hal ini mengenai faktor keselamatan pelaut itu sendiri. Selain itu juga karena *spot-spot* tempat berlayar sering dieksploitasi sehingga mengakibatkan nelayan harus berlayar lebih jauh untuk memperoleh hasil laut. Kendala yang muncul adalah masih banyak nelayan yang menggunakan perahu dan peralatan tradisional untuk mengambil hasil laut. Walaupun beberapa nelayan

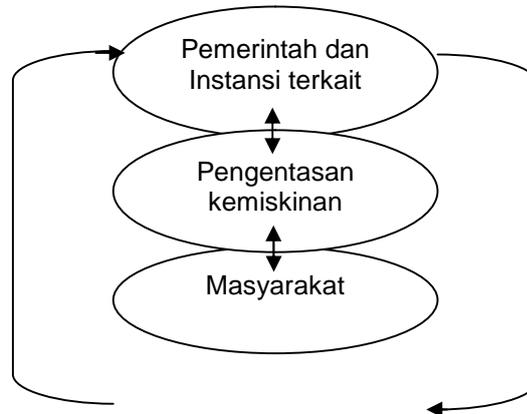
ada yang menggunakan mesin diesel dengan bahan baku solar namun dengan kebutuhan bensin atau solar yang bisa mencapai puluhan liter per hari membuat nelayan mengeluarkan biaya produksi tinggi.

Selain masalah teknis ada hal menarik yang perlu dikaji terkait budaya yang menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir. Budaya merupakan hal yang sulit dirubah karena menyangkut *mindset* masyarakat terkait dengan nilai budaya yang sudah mengakar. Perlu adanya kesadaran secara individu maupun kolektif baik dengan sosialisasi atau penyuluhan menggunakan pendekatan-pendekatan dialektikal agar dicari secara bersama-sama solusi yang terbaik untuk mengatasi kemiskinan akibat kultur tersebut. Bukan berarti menghilangkan kultur yang ada akan tetapi lebih kepada memodifikasi kultur. Nilai kultur merupakan suatu kekayaan yang sebaiknya dijaga agar tetap *sustainable* dalam jangka waktu panjang. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan nilai budaya di Kabupaten Purworejo tetap dapat dilaksanakan secara kolektif dengan membentuk kelompok yang nantinya mengkoordinir anggota dalam perayaan adat setempat.

Adanya identifikasi secara jelas antara permasalahan dan solusi sehingga kebijakan yang diciptakan tidak bias. Analisa SWOT ini akan sangat membantu dalam menemukan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman. Kekuatan dan peluang merupakan indikasi bahwa daerah tersebut memiliki potensi yang bisa dikembangkan secara optimal untuk mengurangi efek dari kelemahan dan ancaman yang ada. Selain itu dengan menggunakan analisa SWOT pembuat kebijakan akan dengan mudah memilah faktor penyebab kemiskinan baik secara struktural, kultural maupun natural.

### **Solusi yang dapat Diaplikasikan untuk Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Purworejo**

Masalah kemiskinan bukan merupakan hal yang baru bagi kita dan berbagai program pengentasan kemiskinan telah dirancang oleh para pembuat kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang masih besar. Entah program yang tidak tepat untuk mengatasi pengentasan kemiskinan atautkah memang masyarakat yang masih kurang berdaya. Program-program dari pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sudah begitu banyak mulai dari BLT, RASKIN, JAMKESNAS, BOS, KUR (Kredit Usaha Rakyat), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dll. Program pemerintah tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan secara keseluruhan. Namun yang menjadi permasalahan adalah keefektifitasan program dalam mengurangi jumlah angka kemiskinan masih kurang efektif. Kritik terhadap program pengentasan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah rata-rata sifatnya membuat masyarakat menjadi pasif tidak kreatif. Hal ini yang perlu dirubah dalam upaya pengentasan kemiskinan perlu melibatkan masyarakat secara langsung dalam arti masyarakat sebagai subyek pelaksana program pengentasan kemiskinan. Komposisi yang tepat dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan selain melibatkan pemerintah, dan masyarakat setempat perlu adanya keterlibatan instansi terkait. Hal ini yang perlu diimplementasikan terhadap program pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo. Penjelasan terkait solusi tersebut dapat dibuat gambar 2 sebagai berikut.



Sumber: Data Primer Diolah, 2012

**Gambar 2**  
**Strategi Pengentasan Kemiskinan**

Strategi pengentasan kemiskinan pada dasarnya dapat diatasi dengan melibatkan peran pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat setempat. Dengan kata lain, strategi ini menggabungkan antara perencanaan secara *top-down* dan *bottom-up*. Fungsi dari strategi ini adalah saling melengkapi kekurangan satu sama lain dengan alasan tidak semua upaya dapat dilakukan secara mandiri seluruhnya oleh masyarakat tetap masih diperlukannya pihak luar sebagai pendukung program. Yang perlu dititikberatkan dalam strategi pengentasan kemiskinan ini masyarakat dapat mandiri dan berdaya setelah terlepas dari bantuan dari pemerintah ataupun instansi yang terlibat. Masyarakat dapat secara kreatif dan aktif mengembangkan program yang diberikan oleh pemerintah agar individu dalam masyarakat mempunyai *value added* yang dapat digunakan bertahan dan meningkatkan taraf hidupnya. Di dalam proses berlangsungnya pengentasan kemiskinan perlu adanya suatu monitoring dan evaluasi agar berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga program pengentasan kemiskinan memiliki dampak yang cukup signifikan dalam pengurangan angka kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo.

Menjawab masalah kemiskinan tidak bisa dengan satu kebijakan (*single policy*) dapat mengatasi semua kasus kemiskinan. Perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung yang sangat paham mengenai apa yang terjadi di lingkungannya. Keterlibatan masyarakat difokuskan sebagai subjek pembangunan bukan sebagai obyek pembangunan dengan tujuan secara mandiri mampu mengembangkan potensi dan kemampuan diri. Berdasarkan Tabel 2.4. identifikasi masalah digolongkan berdasarkan struktural, kultural dan natural. Masing-masing identifikasi masalah akan dikaitkan langsung pada strategi pengentasan kemiskinan apakah bersifat *top-down* ataukah *bottom-up* disesuaikan dengan realitas yang ada. Apabila jenis masalah sudah teridentifikasi dan diketahui strategi pengentasannya maka dibuat aplikasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat untuk menjawab persoalan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo.

## PENUTUP

Menjawab berbagai permasalahan di dalam pengentasan kemiskinan nampaknya tidak bisa hanya menggunakan pendekatan satu solusi. Begitu juga untuk kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo yang memiliki kehidupan kompleks baik secara struktural, kultural maupun natural. Keadaan seperti ini yang menjadi tantangan bagi para pembuat kebijakan untuk dapat mengupayakan pendekatan program yang mampu mengurangi angka kemiskinan masyarakat pesisir. Pendekatan secara struktural yaitu lebih ke arah teknis, di mana penyediaan sarana prasarana serta alat produksi yang mendukung dan memperlancar kegiatan produksi masyarakat pesisir. Kemudian pendekatan yang dilakukan secara kultural yaitu memberikan pengetahuan, informasi dan ketrampilan kepada masyarakat pesisir agar terbuka wawasannya (*open minded*) sehingga bisa meningkatkan kualitas diri dan lebih berdaya. Selain itu juga perlunya pengembangan kelembagaan dalam bentuk misalnya kelompok nelayan secara permanen sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman, informasi, kerjasama dalam berlayar hingga proses produksi dan juga untuk mengatur perencanaan upacara adat dan kegiatan budaya lainnya. Yang terakhir pendekatan pengentasan kemiskinan disebabkan karena natural yang terkait dengan alam akibat gangguan iklim dan cuaca dapat di atasi dengan memberikan alternatif-alternatif pekerjaan yang dapat dilakukan selama musim tidak dapat diandalkan untuk berlayar. Perlu diketahui ketiga pendekatan yang dilakukan dilihat berdasarkan penyebab kemiskinan pada kasus masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo dibingkai di dalam sebuah strategi yang melibatkan pemerintah, instansi terkait dan masyarakat setempat sehingga diharapkan selain masyarakat dapat berdaya namun juga program yang dijalankan tetap bisa terus berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. Jumlah Penduduk Miskin Naik. <http://radarjogja.co.id>. Diakses tanggal 24 April 2013.
- Anonim. 2012. Profil Daerah Kabupaten Purworejo Statistik Penduduk Menurut Jenis Kelamin. <http://regionalinvestment.bkpm.go.id>. Diakses tanggal 24 April 2013.
- BPS. 2012. *Data Strategi BPS*. CV. Nasional Indah. Jakarta.
- Febriana, Enny. 2010. *Strategi untuk Tinjauan Literatur*. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Godzwaard, Bob dan Harry de Lange. 1998. *Di Balik Kemiskinan dan Kemakmuran*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. LkiS. Yogyakarta.
- Sudarwati, Ninik. 2009. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*. INTIMEDIA. Malang.

- Susilowati, Sri Hery. 2010. Pendekatan Skala Ekuivalensi untuk Mengukur Kemiskinan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 28(2): 91-105.
- Utami, Santi Muji. 2010. Kebutuhan Dasar dan Perilaku Masyarakat (Studi Sosial Masyarakat Pesisir Kota Semarang). *Eksplanasi* 5(1): 28-38
- Waluyo, Dwi Eko. 2006. Studi Tentang Bentuk Kemiskinan Penduduk di Desa Cindogo Kecamatan Tapen Kab. Bondowoso. *Humanity* 1(2): 129-141.

### Lampiran 1. Solusi Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Kabupaten Purworejo

Jenis Masalah	Identifikasi Masalah	Strategi Pengentasan Kemiskinan		Aplikasi Kebijakan
	Struktural/kultural/natural	Top-Down	Bottom-Up	
Kurangnya fasilitas kapal untuk menangkap ikan yang dapat menjangkau sampai jarak jauh (motorisasi).	Struktural		-	Bantuan berupa kapal mesin kepada masyarakat melalui kelompok nelayan.
Keterjangkauan bensin yang mahal	Struktural		-	Pengalokasian bahan bakar bensin ataupun solar kepada masyarakat pesisir dengan harga yang relatif murah.
Upacara adat laut yang menelan biaya tinggi	Kultural	-		Memanfaatkan fungsi kelompok nelayan untuk secara bersama-sama menanggung upacara adat laut.
Berlakunya strata di masyarakat nelayan yang berdampak pada bagi hasil	Kultural		-	Dengan pengaktifan TPI untuk menghindari dominasi terhadap kaum lemah.
Sumber daya manusia yang kurang berdaya	Kultural	-		Mencanangkan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat pesisir agar memiliki nilai tambah dan mandiri. Bisa lebih mengolah hasil ikan dengan berbagai cara baik olah matang maupun olah kering, ketrampilan membuat kerajinan tangan dari hasil laut serta ketrampilan dalam membuat garam.
Cuaca dan musim yang tidak menentu	Natural	-		Memberikan solusi untuk mencari pekerjaan alternatif lainnya di daratan. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Alternatif pekerjaan yang bisa dikembangkan di kawasan pesisir antara lain: membuka lokasi wisata alam yang ramah lingkungan, pembuatan garam, membuka usaha rumah makan ala sea food, membuat hand made khas pesisir, membuat makanan ringan dari hasil laut dll.

Sumber: Data Primer Diolah, 2012